

## KPPN Tanjung laporkan alokasi APBN 2020 senilai Rp1,28 triliun



<https://banjarmasin.tribunnews.com/2019/12/10/dipa-2020-diserahkan-bupati-hsu-abdul-wahid-mintagunakan-anggaran-belanja-seoptimal-mungkin>

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tanjung Kalimantan Selatan melaporkan alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk tiga kabupaten diwilayah kerjanya mencapai Rp1,28 triliun.

Kepala KPPN Tanjung Bayu Setiawan Yuniarto di Amuntai, Selasa mengatakan, porsi terbesar dari belanja APBN di kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) Tabalong dan Balangan yakni pada fungsi pelayanan umum sebesar Rp739,5 miliar, pendidikan sebesar Rp287,86 M dan fungsi ketertiban dan keamanan sebesar Rp192,67 miliar.

Untuk 2020 alokasi APBN terbesar diberikan kepada Kabupaten HSU yakni Rp530,4 miliar, Kabupaten Tabalong total Rp441,5 miliar dan Kabupaten Balangan total Rp307,7 miliar.

Bayu mengatakan, besaran alokasi APBN ini menunjukkan komitmen pemerintah pusat kepada Kabupaten HSU, Tabalong dan Balangan dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan dasar dan menengah serta

pengembangan pendidikan. Juga alokasi bagi pelayanan ketertiban, keamanan, pembinaan hukum dan peradilan, perlindungan dan penelitian. Pada kegiatan penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) petikan TA 2020 satuan kerja di wilayah pembayaran KPPN Tanjung yang dilaksanakan di Aula KH. DR. Idham Chalid Amuntai, Bayu mengatakan, sebanyak 91 program dilaksanakan pada DIPA 2020 untuk satuan kerja di wilayah pembayaran KPPN Tanjung.

Bayu menegaskan, implementasi APBN memerlukan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan. Dimana komitmen serta sinergi akan mempercepat pencapaian target pembangunan diantaranya memacu pertumbuhan ekonomi pengurangan pengangguran dan kemiskinan. Program kerja yang menjadi prioritas nasional seperti pembangunan sumber daya manusia pembangunan infrastruktur, penyederhanaan segala bentuk kendala regulasi, transformasi ekonomi serta penyederhanaan birokrasi. Pada acara ini pula dilakukan kegiatan penandatanganan fakta integritas dan pemberian apresiasi atas kinerja terbaik satker pada 2019.

Apresiasi yang diberikan bagi 12 indikator penilaian pelaksanaan kinerja yakni untuk total DIPA Rp2,4 miliar terbaik 1 Polres Tabalong, 2 Badan Pusat Statistik Kabupaten HSU, 3 MA Negeri 2 HSU. Untuk DIPA kurang dari Rp2,4 miliar terbaik 1 KPPN Tanjung, 2: BNN Kabupaten Balangan, 3 MA Negeri 1 Balangan. Ketepatan waktu pengajuan pembayaran gaji peringkat 1 Lapas Kelas IIB Amuntai, 2 k Kemenag Balangan, 3 MTs Negeri 2 Balangan. Kategori rekonsiliasi dan laporan keuangan terbaik 1 MTs Negeri 6 HSU, 2 MTs Negeri 4 Tabalong, 3 MA Negeri III Tabalong. Kategori pengelolaan kartu kredit pemerintah (KKP) terbaik 1 KPPN Tanjung, 2 Pengadilan Agama Amuntai, 3 Pengadilan Agama Tanjung. Satuan kerja dengan pengelolaan keuangan terbaik, peringkat 1 MTs Negeri 6 HSU, peringkat 2: MTS Negeri 4 Tabalong dan 3 Kemenag Balangan. Kegiatan penyerahan DIPA kali ini mengambil tema APBN untuk akselerasi daya saing melalui inovasi dan penguatan kualitas sumber daya manusia

#### **Sumber Berita:**

1. **h <https://kalsel.antaranews.com>**, KPPN Tanjung laporkan alokasi APBN 2020 senilai Rp1,28 triliun, Senin, 30 Desember 2019.
2. **<https://matabanua.co.id>**, KPPN Tanjung laporkan alokasi APBN 2020 senilai Rp1,28 triliun, Senin, 30 Desember 2019.

**Catatan:**

- ✿ Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri empat kategori yakni:
  1. Kesesuaian Perencanaan dan Penganggaran;
  2. Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan;
  3. Kepatuhan Terhadap Regulasi;
  4. Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan.
  
- ✿ 12 Indikator Penilaian dalam Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran, yaitu:
  1. Penyerapan Anggaran (bobot 20%);
  2. Penyelesaian Tagihan (bobot 20%);
  3. Deviasi Halaman III DIPA (bobot 5%);
  4. Data Kontrak (bobot 10%);
  5. Pengelolaan Uang Persediaan (UP) (bobot 10%);
  6. Revisi DIPA (bobot 5%);
  7. Pengembalian/Kesalahan SPM (bobot 5%);
  8. Retur SP2D (bobot 5%);
  9. Penyampaian LPJ Bendahara (bobot 5%);
  10. Renkas/ RPD Harian (bobot 5%);
  11. Nilai Pagu Minus Belanja Pegawai (bobot 5%);
  12. Dispensasi Pengajuan SPM (bobot 5%).

(Sumber: <https://djpbk.kemenkeu.go.id/kppn/painan/id/berita/berita-terbaru/202-berita-kantor-pelayanan-perbendaharaan-negara/2845-sosialisasi-indikator-kinerja-pelaksanaan-anggaran.html>)